

BAB III

KEMAMPUAN PEMERINTAH DALAM MENGELOLA KEBIJAKAN UNTUK MENGHADAPI INVESTASI ASING

Bab ini akan memaparkan penjelasan terhadap hipotesa pertama untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, yakni mengenai faktor-faktor yang menyebabkan investasi asing gagal mengatasi masalah-sosial ekonomi di Batam, Kepulauan Riau. Faktor pertama, yaitu **kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan yang dijalankan dalam menghadapi neoliberalisme yang masuk ke Batam dalam bentuk investasi asing.**

Globalisasi memberikan ruang yang leluasa untuk neoliberalisme tumbuh dan berkembang, yang ditunjukkan dengan mudahnya mobilisasi aktifitas produksi dan mudahnya investasi asing masuk, membuat masyarakat lokal tidak sepenuhnya dapat lepas dari masalah sosial-ekonomi yang mereka hadapi, meskipun nilai investasi semakin meningkat. Investasi asing dari tahun ke tahun semakin meningkat angkanya. Berbeda dengan investasi pemerintah atau investasi domestik yang setiap tahunnya, dari tahun 2013 hingga 2015 mengalami penurunan, meski tidak terlalu signifikan.

Daerah perkotaan seperti Kota Batam, cenderung berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial-ekonomi yang menjadi daya tarik yang kuat bagi berbagai sumber daya ekonomi, termasuk sumber daya manusia. Luasnya pasar produk yang tersedia di perkotaan membuat akumulasi modal dan aplikasi teknologi biasanya

lebih berorientasi pada area perkotaan.¹ Terpusatnya aktifitas ekonomi di kota Batam merupakan peluang, karena hal tersebut dapat meningkatkan produktifitas Batam, karena kegiatan produksi terpusat di kota tersebut.

Ketika pemerintah dihadapkan pada suatu kondisi, di mana ada tantangan yang harus dihadapi ketika sektor swasta terutama dari pihak asing menggerakkan perekonomian, maka seharusnya pemerintah dapat memperjelas garis perannya sebagai pihak yang mengarahkan dengan baik segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan aturan atau kegiatan usaha atau produksi, agar tidak terjadi ketimpangan dalam keuntungan yang dihasilkan, yang seharusnya dapat dinikmati tidak hanya oleh pihak asing, namun juga bagi pemerintah dan masyarakat lokal.

Misalnya, pada kebijakan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Batam, yang sangat terbuka untuk investasi asing. Kemudahan aplikasi investasi asing di Batam membuat iklim investasi di Batam menjadi baik. Lama pengurusan investasi tidak lebih dari 20 hari kerja untuk mendapatkan persetujuan. Semua izin dan perizinan yang diperlukan untuk memulai pembangunan juga diproses dengan sistem *one stop service* atau sistem “dibawah satu atap” oleh BP Batam, yang membuat aplikasi investasi asing menjadi lebih mudah. Kemudahan ini membuat investor asing mempercayakan perusahaannya untuk berdiri di Batam.

Di satu sisi, kemudahan prosedur dalam penanaman investasi bagi pihak asing tersebut merupakan kebijakan yang membuka kesempatan bagi pemerintah Batam untuk meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap Batam dan mendatangkan lebih banyak investasi asing untuk masuk ke Batam. Kemudahan perizinan tersebut membuat investor lebih mudah berinvestasi, yang berarti

¹ Meinarno, E. A., Widiyanto, B., & Halida, R. (2011). *Manusia Dalam Kebudayaan dan Masyarakat*. Jakarta: Salemba Humanika. Hlm. 219

perusahaan –perusahaan dari investasi asing juga lebih mudah untuk didirikan. Semakin banyak perusahaan asing yang didirikan, semakin lebar kesempatan kerja yang tersedia di Batam, dan ini artinya angka pengangguran dapat ditekan. Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penanaman modal asing, yakni untuk menciptakan lapangan pekerjaan, berarti salah satu masalah sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat Batam, yaitu pengangguran, semestinya dapat diatasi.

Namun, masalah pengangguran ternyata tidak dapat selesai begitu saja meski investasi asing dengan mudah masuk ke Batam. Berdasarkan data statistik di tahun 2013, pengangguran di Batam berjumlah 32.031 orang, dan angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2014, yakni menjadi 35.735 orang. Investasi asing yang ditujukan untuk menekan angka pengangguran dengan banyak berdirinya perusahaan asing ternyata tidak bisa menurunkan angka pengangguran di Batam. Pada tahun 2015, berdasarkan data dari Disnaker, bahwa ada 24.022 pencari kerja di Batam, namun lowongan yang tersedia hanya untuk 12.903. Dari angka tersebut, berarti hampir separuh dari angka pencari kerja terancam menjadi pengangguran.

Jika diperhatikan kembali, pengangguran di Batam mengalami peningkatan karena kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan untuk mengantisipasi lajunya migrasi penduduk dari luar Batam. Meskipun telah ada peraturan daerah yang mengatur tentang kependudukan, yakni Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009, yang diharapkan dapat membendung meledaknya jumlah penduduk di Batam, namun ternyata jumlah penduduk yang bergerak dari luar Batam tetap tidak bisa diatasi.

Aktifitas produksi Kepulauan Riau yang berpusat di Batam, disebabkan oleh ramainya investor asing yang mendirikan perusahaan-perusahaan di Batam. Perusahaan-perusahaan yang berdiri tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja. Lowongan pekerjaan yang tersedia di perkotaan seperti Batam, menjadi daya tarik bagi penduduk di luar Batam untuk mencari pekerjaan di Batam. Perusahaan-perusahaan yang berdiri di Batam kebanyakan merupakan milik pihak asing, dan kebanyakan penduduk dari luar Batam beranggapan bahwa upah yang akan didapatkan ketika bekerja di perkotaan akan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Daya tarik tersebut mendorong penduduk dari luar Batam melakukan migrasi, berpindah dari daerah lain menuju Batam, untuk mencari pekerjaan dan memulai kehidupan di Batam. Arus pergerakan penduduk tersebut tercatat dalam data statistik dari 2013 hingga 2015, bahwa pada tahun 2013, jumlah penduduk di Batam mencapai 1.094.623 jiwa, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2014, yaitu sebanyak 1.141.816 jiwa, kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2015 sebanyak 1.188.985 jiwa.

Semakin besar angka penduduk di Batam, semakin tinggi pula kemungkinan meningkatnya angka pengangguran, mengingat meskipun banyak pabrik-pabrik yang berdiri di Batam dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, namun ada batasan kapasitas setiap perusahaan untuk menampung tenaga kerja.

Jumlah penduduk yang tinggi setiap tahunnya kurang diantisipasi oleh pemerintah. Meski sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang kependudukan, dengan maksud untuk mendisiplinkan setiap penduduk yang keluar-masuk ke Batam, namun tetap saja angka jumlah penduduk di Batam tidak

bisa dikendalikan. Hal ini menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, dari tahun 2013 hingga 2015.

Ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang maksimal dalam mengelola kebijakan, dalam hal ini kebijakan untuk mengatur pergerakan migrasi penduduk dari luar Batam. Investasi asing dilaksanakan dengan tujuan yang baik dan akan menghasilkan keuntungan yang baik pula jika pemerintah bisa mengelola kebijakan dengan baik. Jika pemerintah dapat mengelola kebijakan tentang perpindahan penduduk dengan baik, maka membludaknya jumlah penduduk dapat diantisipasi dan kenaikan angka pengangguran dapat dicegah.

Dampak lain dari kurangnya kemampuan pemerintah mengelola kebijakan ini juga dapat dilihat dari persebaran rumah liar dan kumuh, yang menjadi salah satu tanda bahwa masih ada masalah dalam kesejahteraan masyarakat. Kembali lagi pada kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan tentang kependudukan untuk mengontrol jumlah pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk yang sangat besar di Batam menyebabkan lahan pemukiman semakin menyempit dan akhirnya menciptakan pemukiman-pemukiman kumuh yang biasanya berdiri tanpa izin resmi dari pemerintah daerah dalam pendirian bangunannya.

Kondisi perumahan suatu rumah tangga menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut, terutama dalam kaitannya dengan ekonomi dan kesehatan.² Pada tahun 2013, rumah tangga kumuh yang ada di daerah perkotaan Kota Batam menunjukkan angka 3.29% dan mengalami peningkatan di tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2015 dengan angka 3.36%.³ Perumahan kumuh yang

² BPS Kota Batam. (2015). *Statistik Daerah Kota Batam 2015*. Batam: Badan Pusat Statistik Kota Batam. hlm. 8

³ Ibid.

biasanya dibangun tanpa izin tersebut merupakan akibat dari semakin naiknya angka jumlah penduduk yang ada di Kota Batam, sementara lahan yang memang disediakan untuk pemukiman semakin sempit. Orang-orang yang datang dari luar Batam biasanya merupakan orang-orang yang memang hendak mengadu nasib di perkotaan, mencari pekerjaan, dan memutuskan untuk menetap di Batam, meski tanpa kelengkapan surat-menyurat yang jelas untuk menjadi penduduk Batam.

Persebaran rumah liar di Batam menjadi masalah yang belum teratasi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Banyak sekali rumah liar yang tersebar di setiap kecamatan di Kota Batam. Setiap tahun angka rumah liar yang tersebar di Kota Batam meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Persebaran rumah liar menandakan bahwa tidak terpenuhinya kesejahteraan masyarakat karena kebutuhan akan papan atau tempat tinggal masih belum terpenuhi dengan baik.

Kurangnya kemampuan pemerintah dalam memaksimalkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan untuk mengatur kependudukan inilah yang akhirnya berdampak pada sulit diatasinya masalah sosial-ekonomi di Batam, seperti pengangguran dan kesejahteraan masyarakat yang rendah, meskipun angka investasi asing di Batam semakin naik dari tahun ke tahun.

Jika pemerintah dapat memaksimalkan kebijakan yang ada, seperti kebijakan peraturan daerah tentang kependudukan, untuk menekan laju jumlah penduduk, maka jumlah penduduk dapat lebih dikontrol, jumlah pekerja dan lowongan pekerjaan dapat seimbang, sehingga perusahaan-perusahaan asing yang merupakan wujud dari investasi asing dapat memberikan kontribusi dalam

penyelesaian masalah sosial-ekonomi di Batam, seperti pengangguran dan rendahnya kesejahteraan masyarakat.

Masih membicarakan masalah ketenagakerjaan di Batam, yang juga termasuk dalam masalah sosial-ekonomi di Batam, kebijakan pemerintah yang tidak mengelak terhadap era pasar bebas ditengah kepopuleran pernyataan bahwa jumlah tenaga kerja di Indonesia terhitung banyak, murah, dan fleksibel, dengan atau tanpa perjanjian kerja. Hal ini akhirnya menimbulkan kesenjangan upah antara pekerja lokal dengan pekerja asing.⁴

Berkaitan dengan faktor yang menyebabkan investasi asing gagal mengatasi masalah sosial-ekonomi di Batam, salah satunya pada masalah ketenagakerjaan. Pemerintah kurang memaksimalkan kebijakan yang telah dibentuk untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan ini, sehingga investasi asing yang seharusnya memberikan manfaat seperti penyediaan lapangan kerja bagi pencari kerja dan peningkatan kesejahteraan, malah gagal mengatasi masalah-masalah sosial-ekonomi di Batam yang berkaitan dengan pengangguran dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini ditunjukkan dengan belum maksimalnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015, mengenai pengupahan. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang kebijakan pengupahan yang diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja atau buruh. Penghasilan yang layak yang dimaksudkan merupakan jumlah penerimaan atau

⁴ Komisi XI DPR RIKE Batam Provinsi Kepulauan Riau. (2016). *Laporan Kunjungan Spesifik: Permasalahan Ketenagakerjaan Yang Berkaitan Dengan Dirumahnya Pekerja dan PHK Secara Massal*. Batam: Komisi XI DPR RIKE Batam Provinsi Kepulauan Riau.

pendapatan pekerja atau buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya secara wajar.⁵

Kebijakan tersebut tidak tersosialisasikan dikalangan buruh atau pekerja dan pengusaha, sehingga penerimaan upah oleh pekerja tidak didapatkan seperti sebagaimana mestinya. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, terutama pekerja yang bekerja untuk pengusaha asing. Permasalahan lainnya muncul dengan penerapan peraturan pemerintah no 78. tahun 2015 tentang Pengupahan, di mana penetapan pengupahan (upah minimum dan upah sektoral) yang dilakukan melalui Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota ditiadakan. Akibatnya, upah minimum dan upah sektoral yang didapatkan oleh buruh atau pekerja lebih rendah daripada yang seharusnya diterima. Mekanisme penetapan upah, baik upah minimum maupun upah sektoral melalui pengaturan dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan juga tidak mengakomodir Kebutuhan Hidup Layak di Kota Batam, sehingga mengakibatkan upah minimum yang diterima pekerja atau buruh di Kota Batam tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak di Kota Batam.

Kebutuhan Hidup Layak merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak, baik secara fisik, non-fisik dan sosial, untuk kebutuhan selama satu bulan.⁶ Standar Kebutuhan

⁵ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2015, November 3). *Inilah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan*. Retrieved May 2017, from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <http://setkab.go.id/inilah-peraturan-pemerintah-nomor-78-tahun-2015-tentang-pengupahan/>

⁶ Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. (n.d.). *Standar Kebutuhan Hidup Layak*. Retrieved May 2017, from kspsi.com: <http://kspsi.com/analisa-dan-data/analisa/standar-kebutuhan-hidup-layak-khl/>

Hidup Layak terdiri dari makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan.⁷

Upah minimum yang tidak sesuai di Batam, yang terjadi akibat kurang maksimalnya pemerintah dalam mengelola kebijakan yang ada, yakni PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, membuat standar kebutuhan hidup layak di Kota Batam belum dapat terpenuhi oleh pekerja atau buruh, seperti yang dilaporkan oleh Komisi IX DPR RIKE Kota Batam, dalam Laporan Kunjungan Spesifik yang dilaksanakan pada Februari 2016.⁸

Investasi asing yang sangat mudah masuk ke Batam merupakan bagian dari pengaruh globalisasi, yang membawa neoliberalisme di Batam. Pelaksanaan investasi oleh pihak asing bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi oleh perusahaan pihak asing untuk meningkatkan aktifitas ekonominya. Sedangkan, untuk wilayah yang ditempati investasi asing, kedatangan dari investor asing merupakan komponen yang penting dalam proses pembangunan karena membantu meningkatkan aktifitas ekonomi di wilayah tersebut, sehingga faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja dan lahan dapat terpakai. Dengan begitu, tingkat pengangguran dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan hadirnya investasi asing.

⁷ Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia , Ibid.

⁸ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia , Op. Cit.